

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan terkait dengan tujuan penelitian ini :

- 1) Hasil estimasi dan hasil analisis dalam Bab IV telah membuktikan bahwa dengan menggunakan 2 model pengukuran ilusi fiskal yaitu model pengukuran pendapatan dan model manipulasi belanja terdapat ilusi fiskal pada kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selama periode 2007-2012. Model manipulasi belanja menjelaskan lebih spesifik terdeteksinya ilusi fiskal dibandingkan model pengukuran pendapatan dengan adanya hubungan positif variabel rasio dari pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah terhadap anggaran PAD.
- 2) Hasil regresi menggunakan pendekatan pengukuran pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang memiliki kemungkinan terdeteksi ilusi fiskal pada kinerja keuangan daerah terbesar adalah Kabupaten Lampung Tengah dengan konstanta sebesar 5.01842 karena Kabupaten Lampung Tengah memiliki pengeluaran daerah yang paling tinggi diantara kabupaten/kota lainnya.

- 3) Hasil regresi menggunakan pendekatan pengukuran pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang memiliki kemungkinan terdeteksi ilusi fiskal pada kinerja keuangan daerah terkecil adalah Kota Bandar Lampung dengan nilai konstanta sebesar 4.976569.
- 4) Hasil regresi menggunakan pendekatan manipulasi belanja Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang memiliki kemungkinan terdeteksi ilusi fiskal pada kinerja keuangan daerah terbesar adalah Kota Bandar Lampung dengan nilai konstanta -5.628673 karena Kota Bandar Lampung adalah ibukota Provinsi Lampung, dimana pertumbuhan ekonomi terjadi sangat pesat di pusat ibukota.
- 5) Hasil regresi menggunakan pendekatan manipulasi belanja Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang memiliki kemungkinan terdeteksi ilusi fiskal pada kinerja keuangan daerah terkecil adalah Kabupaten Lampung Utara dengan nilai konstanta -7.00606

B. Saran

1. Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah harus mengetahui sektor mana saja yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya, dan mempertimbangkan seberapa besar belanja daerah dan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja. Dengan memperhatikan komponen tersebut diharapkan penerimaan dan pengeluaran terjadi keseimbangan sehingga tidak akan terjadi ilusi fiskal atau perilaku negatif pemerintah daerah sehingga tidak akan terjadi

kesenjangan fiskal antar daerah yang membuat daerah semakin mandiri dalam keuangan tanpa memprioritaskan bantuan dari pemerintah pusat.

2. Bagi pemerintah pusat, agar senantiasa melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana perimbangan yang diberikan kepada daerah. Hal ini dilakukan agar dana perimbangan tepat sasaran dan guna, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.